

**PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT, PENGENDALIAN INTERNAL,  
AUDIT INTERNAL DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN**

**Gusnardi**

gusnardi1967@yahoo.com & mgusnardi@yahoo.co.id

**Fakultas Ekonomi Universitas Riau**

**ABSTRACT**

*The needs for good corporate governance in the last ten years have been evidenced, especially after the failure of some big companies. In Indonesia, the good corporate governance become more important since this country experienced a multi dimension crisis at the middle of the 1997, where all government agents and private enterprises were required to implement the corporate governance. The purpose of this research is to explore the influence of audit committee role, internal control, internal audit, and good corporate governance implementation simultaneously and partly on the fraud prevention over the state-owned companies. This research was conducted by census methods over 13 public BUMN in Indonesia. The data used in this research were primary data collected by questioners. The research respondents were audit committee chairman, financial director, internal audit department chairman, and corporate secretary. The validity and reliability of the data was tested before hypothesis testing. The data analysis for hypothesis testing was the path analysis. This research concludes the of audit committee role, internal control, internal audit, and good corporate governance implementation influential significant to Fraud prevention the state-owned companies in Indonesia. From this research expressed that optimal from audit committee role, internal control exercise, internal audit and good corporate governance implementation can prevent the happening of fraud prevention over the state-owned companies in Indonesia.*

*Keyword: audit committee, internal control, internal audit, good corporate governance, and fraud.*

**PENDAHULUAN**

Perhatian dunia usaha terhadap Tata Kelola Perusahaan meningkat sejak negara-negara di Asia di hantam krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 dan terbukanya skandal keuangan perusahaan raksasa dunia, termasuk *Enron Corporation*, *Worldcom*, dan *Global Crossing*. Krisis ini berdampak sangat luas terutama dalam merontokkan rezim-rezim

politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Ketiga negara yang diawal tahun 1990-an dipandang sebagai “Macan Asia” harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh, yang akhirnya berujung pada krisis keuangan, ekonomi dan akhirnya merambat ke krisis politik.

Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama terjadinya krisis ekonomi tersebut adalah karena lemahnya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) di banyak perusahaan termasuk BUMN dan BUMS di Indonesia. Untuk perusahaan yang dikelola pemerintah atau sebagian kepemilikannya dikuasai pemerintah (BUMN) bahkan sudah diatur supaya dalam pelaksanaan kegiatannya harus berpedoman kepada *corporate governance*.

Sehubungan dengan penerapan GCG pada BUMN, dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan pada 16 BUMN selama bulan Oktober 2002 sampai Mei 2003, ternyata hanya enam perusahaan BUMN yang memiliki kinerja baik. Dari hasil audit BPKP tersebut bahwa komitmen BUMN untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan masih rendah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan GCG guna memperbaiki kinerja perusahaan, khususnya BUMN di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 2 yang mewajibkan BUMN menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten.

Untuk dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang diharapkan semua pihak terutama di BUMN-BUMN diperlukan peran yang optimal dari Komite Audit, Pengendalian Internal dan Audit Internal. Dengan terlaksananya *corporate governance* diharapkan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan kecurangan yang selama ini merugikan mayoritas BUMN dapat dikurangi bahkan dihindari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu; apakah peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan pada BUMN Terbuka di Indonesia.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terhadap pencegahan Kecurangan baik secara simultan maupun secara parsial pada BUMN Terbuka di Indonesia.

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan publik yang memiliki Komite Audit dapat merupakan kegunaan praktis untuk menjadi masukan sejauh mana pengaruh peran Komite Audit, *Internal Control* dan *Internal Audit* dapat menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pencegahan *Fraud*.
2. Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan pengembangan teori-teori yang telah ada, mengenai ilmu *auditing*, *Internal Control*, *Internal Audit*, *Fraud Auditing* dan *Corporate Governance*.
3. Bagi pendidikan tinggi dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam melengkapi bahan bacaan/literatur bidang akuntansi dan manajemen.

### TINJAUAN TEORETIS

Studi-studi yang dilakukan tentang Komite Audit di Indonesia masih jarang dilakukan, karena Bapepam dan BEJ sendiri baru mewajibkan para emiten untuk membentuk Komite Audit pada tahun 2000. Namun demikian, sudah cukup banyak studi ini dilakukan di negara-negara maju yang terlebih dahulu mewajibkan perusahaan-perusahaan yang *go public* untuk membentuk Komite Audit, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia.

Sesungguhnya Komite Audit sudah ada lebih dari lima dekade yang lalu, yang diperkenalkan oleh *Securities Exchange Commission (SEC)* di Amerika Serikat, namun baru berkembang pesat saat diwajibkan bagi perusahaan yang akan *listing* untuk mempunyai Komite Audit sejak tahun 1978. Hal ini dipertegas dengan adanya laporan dan rekomendasi dari *The Treadway Commission* (1987), *The Public Oversight Board* (1993) dan *The Kirk Panel* (1994) di Amerika Serikat. Sementara di United Kingdom (UK) hanya direkomendasikan untuk mempunyai Komite Audit dari pada suatu keharusan, sampai munculnya *Cadbury Code* dari *The Cadbury Committee* pada tahun 1992 dan *The Research Committee of the ICAS* (1993) yang memberikan dorongan bagi perusahaan-perusahaan untuk membentuk Komite Audit.

Begitu juga di Kanada oleh *The Mcdonald Commission* (1988) dan *The Toronto Stock Exchange Committee on Corporate Governance* (1994) yang mengatakan bahwa Komite Audit memegang peranan penting dalam *corporate governance*.

KPMG (2004) menyatakan bahwa Komite Audit berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya dalam mengawasi organisasi dengan mengandalkan *Internal Audit* sebagai sumber utama dalam membantu mereka untuk memastikan kualitas *corporate governance*.

Penelitian sebelumnya terhadap Komite Audit telah dipusatkan pada isu-isu yang berhubungan dengan formasi, komposisi dan benefit dari Komite Audit. Seperti beberapa penelitian berikut ini telah membandingkan perbedaan karakteristik dari perusahaan yang memiliki Komite Audit dengan yang tidak memiliki Komite Audit (Pincus 1989; dan Bradbury et al., 2004). Menggunakan *Agency Theory Framework*, Pincus et.al. (1989) dalam hipotesanya menyatakan bahwa tuntutan untuk dimonitor oleh Komite Audit adalah fungsi dari *agency costs*. Mereka menemukan beberapa proksi bahwa *agency cost* berhubungan erat dengan pembentukan Komite Audit.

Beberapa studi lainnya menguji hubungan keberadaan Komite Audit dan bermacam-macam proksi untuk kualitas laporan keuangan. Defond and Jiambalvo (1994) dalam penelitiannya tentang: *Debt Convenan Violationt and Manipulation of Accruals*, menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang *overstating annual earnings* selama beberapa periode pada perusahaan yang kurang menginginkan adanya Komite Audit.

Halla (1999) dalam penelitiannya: *A View of Corporate Governance and Control In Finland*, menjelaskan bahwa tanggung jawab Komite Audit adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian aset dan akuntansi telah diorganisir cukup memadai. Pembagian tanggung jawab sehubungan dengan *Internal Control* di antara semua anggota organisasi dari atas sampai bawah, yaitu: Komite Audit memberikan pengarahan dan wawasan, pimpinan puncak menetapkan *Internal Control*, menetapkan etika dan iklim organisasi, senior manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih rinci dan personal lainnya bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

Selanjutnya Rindove (1999) yang dimuat dalam *Journal of Management Studies; What Corporate Boards Have to do with Strategy: a Cognitive Perspective*, menyatakan bahwa Komite Audit harus memainkan peranan penting sebagai sistem pemantauan internal untuk memberikan keyakinan bahwa tindakan-tindakan manajemen konsisten dengan kepentingan para pemegang saham. Dalam perkembangannya, Komite Audit bertugas mengawasi tanggung jawab manajemen dalam hal pelaporan keuangan. Peran tersebut mengalami perkembangan saat ini sehingga Komite Audit juga bertugas untuk mengawasi Pengendalian Internal dan kegiatan auditor (DeZoort et.al, 2001).

Pendapat Dockery et al., (2000) dalam penelitiannya: *Corporate Governance, Managerial Strategies and Shareholders Wealth Maximization: A Study of Large European Companies* yang dimuat dalam *Managerial Finance*, menyatakan bahwa pengendalian korporasi diperlukan untuk menjamin kepentingan pemegang saham dalam mengawasi tindakan-tindakan manajemen melalui mekanisme kepengurusan (*the governance mechanism*). Mekanisme kepengurusan dapat membantu untuk membatasi penyimpangan manajerial dari maksimalisasi kesejahteraan pemegang saham. Cadbury (1992) menjelaskan bahwa mekanisme kepengurusan dapat didesain dengan mekanisme internal dan eksternal.

Penelitian yang dilakukan Klein (2000) menemukan bahwa: 1) tidak terdapat hubungan yang sistematis antara komposisi Komite Audit dan perjanjian dengan pemegang saham. 2) sesuai dengan asersi *Blue Ribbon Committee*, komposisi Komite Audit merupakan salah satu unsur dalam mekanisme *corporate governance* dan 3) ditemukan hubungan negatif antara independensi Komite Audit dan alternatif mekanisme *corporate governance*.

Chtourou (2001) menemukan bahwa independensi Komite Audit juga sangat kuat dihubungkan dengan kekuasaan untuk memecat dan mengangkat kepala bagian Audit Internal. Komite Audit yang terlibat dalam keputusan untuk memecat kepala bagian Audit Internal, mempunyai lebih banyak frekuensi pertemuan dengan Audit Internal dibandingkan dengan Komite Audit yang tidak terlibat dalam keputusan tersebut. Penelitian lainnya oleh Agrawal & Knober (1996) menjelaskan bahwa banyak alternatif yang dapat digunakan untuk pengendalian masalah agensi antara manajer dan pemegang saham dan telah menguji tujuh mekanisme pengendalian melalui: pemegang saham dari dalam, dewan komisaris independen (Komite Audit), *debt financing* dan aktivitas pengendalian perusahaan. Zaman (2001) menyatakan pula bahwa Komite Audit akhirnya ikut bertanggung jawab terhadap Pengendalian Internal.

Penelitian lainnya, McMullen (1996) menemukan hubungan antara keberadaan Komite Audit dan kualitas laporan keuangan yang diukur dengan lima faktor (*shareholder litigation alleging Fraud, corrections of reported earnings, SEC enforcement action, illegal acts, or auditor turnover involving disagreements between client and the auditor*).

Jones dan Bates (1990) dalam Firma Sulistiyawati (2003) menyatakan bahwa auditor harus mewaspadai terhadap penipuan, dan mengambil langkah segera untuk menginvestigasi kecurigaannya. Dalam bagian lain Sulistiyawati (2003) juga menyatakan jika *Fraud auditor* dapat bekerja dengan baik maka tindakan Kecurangan (*Fraud*) dapat dikurangi bahkan diberantas, sehingga akan terwujud Tata Kelola Perusahaan. Namun, Beasley (1995) menemukan bahwa Komite Audit tidak signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya Kecurangan pada laporan keuangan.

Lawrence *et al.*, (2000) dengan menggunakan data perusahaan tahun 1980 dan 1996, menguji tingkat aktivitas Komite Audit dan independensi dengan *Fraud* perusahaan. Lawrence *et al.*, menemukan hasil bahwa Komite Audit dengan komposisi dari *director independent* dan dengan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pertemuan setahun dapat mengurangi Kecurangan.

Cattrysse (2002) mengatakan bahwa tindakan *Fraud* dapat diminimumkan dengan penerapan *corporate governance*, juga ECIIA (1999) dan Cattrysse (2002) menyatakan bahwa Auditor Internal yang baik dapat mencegah Kecurangan. Dibagian lain Cattrysse (2002) menyatakan secara umum ada tiga alat pencegahan Kecurangan yaitu: Tata Kelola

Perusahaan, pimpinan organisasi yang baik (bersih), dan penerapan Pengendalian Internal.

Menurut Indra Safitri (Indonesia *Market Links Network*, 2 September 2002) bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh komisaris *independent*, tidak terpisahkan dari berjalannya mekanisme Pengendalian Internal ditubuh emiten termasuk adanya Komite Audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanthi Krishnan (2005) menyimpulkan bahwa independensi dan pemahaman yang mendalam tentang laporan keuangan dari komite audit berhubungan erat dengan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah Pengendalian Internal perusahaan.

Raghuandan *et al.*, (2001) meneliti hubungan antara komposisi Komite Audit dan interaksi Komite Audit dengan Audit Internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit yang independen dan memiliki anggota dengan latar belakang akuntansi atau keuangan, lebih sering melakukan pertemuan dengan Audit Internal, memiliki akses khusus kepada kepala Audit Internal dan mampu melakukan reviu proposal Audit Internal serta memahami laporan yang diberikan oleh Audit Internal.

Berdasarkan panduan, standar dan *best practices* mengenai pelaksanaan *corporate governance*, ditekankan tentang pentingnya kualitas hubungan antara Audit Internal dan Komite Audit. *IIA* (2004) menganjurkan Audit Internal memberikan laporan kepada Komite Audit dan Audit Internal harus memberikan informasi yang tepat kepada Komite Audit. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal dan Audit Internal terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pencegahan Kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN Terbuka di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang berupaya menguji jawaban masalah yang bersifat sementara (hipotesis) berdasarkan teori tertentu. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey* yaitu penelitian dengan menggunakan populasi untuk menjelaskan hubungan antar variabel pada populasi tersebut. Sehubungan dengan jenis penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penelitian yang menggunakan metode survei memiliki ciri-ciri terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu bersifat deskriptif dan juga verifikatif, data dikumpulkan dari sampel yang telah ditentukan, data variabel penelitian diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu, yaitu kuesioner (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh peran Komite Audit, Pengendalian Internal dan Audit Internal dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan pencegahan Kecurangan pada BUMN Tbk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada BUMN Terbuka yang tercatat dan telah membentuk Komite Audit di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pemilihan objek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembentukan Komite Audit sudah diwajibkan oleh Bapepam dan BEJ bagi perusahaan-perusahaan yang *go public* dalam rangka mencapai Tata Kelola Perusahaan yang saat ini sudah menjadi tuntutan bagi perusahaan-perusahaan yang akan masuk tercatat di BEJ.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan *Software Lisrel 8.30*. Penggunaan analisis jalur dengan pertimbangan bahwa pola hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah bersifat korelatif dan kausalitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis jalur digunakan karena secara konseptual antar variabel independen memiliki hubungan.

Dengan analisis jalur dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen baik langsung maupun tidak langsung. Mempermudah pemahaman atas variabel dalam penelitian ini, maka setiap variabel dirumuskan dalam simbol. Untuk mendapatkan pemahaman yang sama, maka berikut ini akan dijelaskan batasan dari variabel penelitian sekaligus ditentukan indikator-indikator beserta skala pengukuran yang akan digunakan, seperti dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Operasionalisasi Variabel**

| Variabel               | Sub Variabel  | Indikator   | Skala   |
|------------------------|---|---|---------|
| Variabel Independen    |   |   |         |
| Komite Audit ( $X_1$ ) | Tujuan Umum dan Otoritas Komite Audit ( $X_{1,1}$ ) | Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Menciptakan iklim yang baik dalam pengelolaan perusahaan, Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, dan Mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian DK. | Ordinal |
|                        | Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit ( $X_{1,2}$ ) | Pengawasan terhadap proses pembuatan LK, Review atas LK mengenai standar dan <i>policy</i> , Pengawasan terhadap proses GCG perusahaan.   | Ordinal |

Tabel 1 lanjutan

| Variabel                          | Sub Variabel   | Indikator  | Skala   |
|-----------------------------------|--|--|---------|
|                                   | Struktur Komite Audit ( $X_{1.3}$ )                  | Pembentukan komite audit, Penunjukkan ketua dan anggota komite audit, dan jumlah anggota KA.   | Ordinal |
|                                   | Syarat-syarat Keanggotaan Komite Audit ( $X_{1.4}$ ) | Skil dan pengalaman mengenai bisnis.<br>Keindependensian, objektivitas, dan profesionalisme anggota komite audit.<br>Integritas, dedikasi, dan pemahaman tentang risiko.<br>Kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik. | Ordinal |
|                                   | Rapat-rapat Keanggotaan Komite Audit ( $X_{1.5}$ )   | Jadwal rapat komite audit.<br>Penyelenggaraan rapat yang teragenda dengan baik.<br>Hasil-hasil rapat harus dicatat dan rinci.  | Ordinal |
|                                   | Pelaporan Komite Audit ( $X_{1.6}$ )                 | Kewajiban pelaporan ke komisaris utama.<br>Kewajiban memberikan laporan dan rincian peran dan tanggungjawab komite audit.<br>Kewajiban komite audit untuk memberikan salinan-salinan risalah rapat ke komisaris utama.       | Ordinal |
|                                   | Kinerja Komite Audit ( $X_{1.7}$ )                   | Evaluasi hasil kerja komite audit oleh pihak independen, dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana kerja tahunan.   | Ordinal |
| <i>Internal Control</i> ( $X_2$ ) | Lingkungan Pengendalian ( $X_{2.1}$ )                | Nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi DK dan KA, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab, dan kebijakan dan praktik sumber daya manusia.          | Ordinal |

Tabel 1 lanjutan

| Variabel                         | Sub Variabel  | Indikator   | Skala   |
|----------------------------------|---|---|---------|
| Internal Audit (X <sub>3</sub> ) | Penaksiran Risiko (X <sub>2,2</sub> )               | Eksistensi dan akurasi, kelengkapan, penilaian dan alokasi, perubahan peraturan dan kebijakan, dan penyajian dan pengungkapan   | Ordinal |
|                                  | Aktivitas Pengendalian (X <sub>2,3</sub> )          | <i>Job description</i> , pengesahan transaksi dan aktivitas, kelengkapan dokumen dan catatan, pengamanan aset dan catatan, pengecekan independen.   | Ordinal |
|                                  | Sistim Informasi dan Komunikasi (X <sub>2,4</sub> ) | Eksistensi, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, ketepatan waktu dan <i>posting</i> dan pengikhtisaran   | Ordinal |
|                                  | Pemantauan (X <sub>2,5</sub> )                      | Frekuensi penilaian aktivitas, fungsi internal audit, saran dari akuntan eksternal, rekonsiliasi laporan keuangan <i>stock opname</i> , rancangan struktur <i>Internal Control</i>                                | Ordinal |
|                                  | Independensi (X <sub>3,1</sub> )                    | Status organisasi, dan Objektivitas   | Ordinal |
|                                  | Kemampuan Profesional (X <sub>3,2</sub> )           | Kesesuaian dengan standar profesi, Pengetahuan dan kecakapan, Hubungan antar manusia dan komunikasi Pendidikan berkelanjutan, Ketelitian profesional  | Ordinal |
|                                  | Lingkup Pekerjaan (X <sub>3,3</sub> )               | Keandalan informasi, Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan, Perlindungan terhadap harta, Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, dan Pencapaian tujuan | Ordinal |

Tabel 1 lanjutan

| Variabel                    | Sub Variabel  | Indikator   | Skala   |
|-----------------------------|---|---|---------|
|                             | Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan ( $X_{3,4}$ )  | Perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaandan tindak lanjut hasil pemeriksaan   | Ordinal |
|                             | Manajemen Bagian <i>Internal Audit</i> ( $X_{3,5}$ )  | Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, perencanaan <i>Internal Audit</i> , berbagai kebijakan dan prosedur, dan kerjasama dengan auditor eksternal  | Ordinal |
| <i>Variabel Dependen</i>    |   |   |         |
| Pelaksanaan GCG (Y)         | 1. Transparansi<br>2. Kemandirian<br>3. Akuntabilitas<br>4. Kewajaran<br>5. Pertanggung-jawaban                                   | Perlindungan hak pemegang Saham, hak mendapatkan informasi yang relevan bagi PS, kemandirian internal, kemandirian eksternal, saluran bagi PS untuk mendapatkan haknya, kewajiban pengungkapan, budaya perusahaan, struktur organisasi, dan pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas   | Ordinal |
| Pencegahan <i>Fraud</i> (Z) | 1. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan program bantuan personel.<br>2. Menghilangkan kesempatan melakukan <i>Fraud</i> | Mempekerjakan orang-orang yang jujur, lingkungan kerja yang positif, kode perilaku, program bantuan personel, <i>Internal Control</i> , mengurangi potensi kolusi, informasi kebijakan perusahaan, pengawasan personel, jalur khusus pelaporan <i>Fraud</i> , proaktif audit tentang <i>Fraud</i> , dan ekspektasi atas hukuman | Ordinal |

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, dan Audit Internal secara Simultan dan Parsial terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Setelah dianalisis selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis pertama dan kedua menggunakan analisis jalur. Model struktural yang akan di analisis, yaitu menguji

pengaruh peran Komite Audit ( $X_1$ ), Pengendalian Internal ( $X_2$ ), Audit Internal ( $X_3$ ) dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan ( $Y$ ) terhadap pencegahan Kecurangan ( $Z$ ). Secara matematis model tersebut dapat dijabarkan dalam persamaan jalur sebagai berikut:

$$Z = P_{ZX1}X_1 + P_{ZX2}X_2 + P_{ZX3}X_3 + P_{ZY}Y + \varepsilon_2$$

Pengaruh peran Komite Audit, Pengendalian Internal, dan Audit Internal terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada BUMN Tbk. di Indonesia sebesar 76,44 %. Hasil ini berarti bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kewajiban perusahaan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan terutama bagi BUMN-BUMN yang *go public* sudah merupakan keharusan, bahkan itu sudah merupakan kewajiban bagi BUMN tersebut dan sudah di atur dalam peraturan Bapepam dan Kep-Men. BUMN RI.

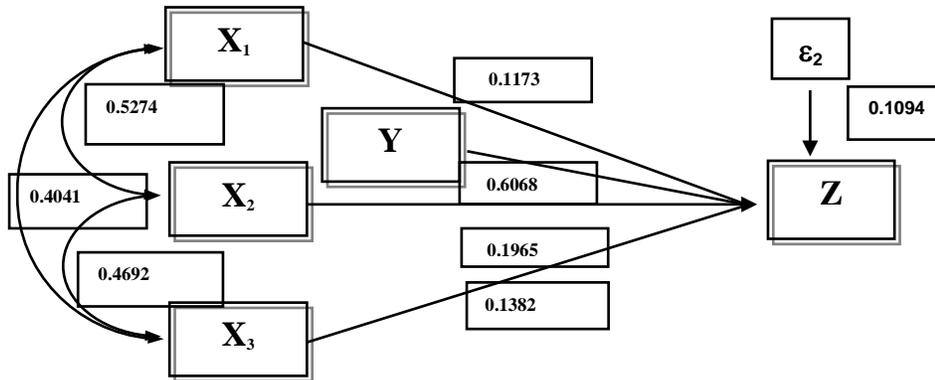
Bahkan salah satu BUMN Tbk. yaitu PT. Timah Tbk. telah melaksanakan komitmen kerjasama dengan BPKP dalam rangka memberdayakan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. Timah Tbk. Komitmen ini sesungguhnya mengandung makna bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan tidak timbul dari desakan formalitas/kewenangan belaka, namun lebih jauh dari itu, yaitu timbul dari kesadaran yang mendalam bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan sangat penting untuk kelangsungan usaha perusahaan yang akan meningkatkan reputasi PT. Timah, Tbk sebagai perusahaan yang terpercaya di pasar modal (*good corporate image*) dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja (*high performance*). (BPKP Online, 18 Juli 2007). Dengan adanya kerjasama penerapan Tata Kelola Perusahaan antara BPKP dengan BUMN Tbk, sesuai dengan visi BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah bertekad untuk ikut membantu terwujudnya *good governance* di sektor pemerintahan dan sektor korporat, pelayanan publik, serta penanggulangan KKN melalui strategi pengawasannya yang bersifat preventif, represif, dan edukatif, sehingga dapat mendorong terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi katalisator untuk terwujudnya *Good Governance*.

#### **Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara Simultan dan Parsial terhadap Pencegahan Kecurangan**

Pengujian hipotesis dengan analisis jalur dilakukan untuk menguji pengaruh peran Komite Audit ( $X_1$ ), Pengendalian Internal ( $X_2$ ); Audit Internal ( $X_3$ ); dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan ( $Y$ ) terhadap pencegahan Kecurangan ( $Z$ ).

Dalam melakukan pengujian hipotesis ini, dilakukan pengujian: 1) menguji pengaruh peran Komite Audit terhadap pencegahan Kecurangan; 2) menguji pengaruh Pengendalian Internal terhadap pencegahan Kecurangan; 3) menguji pengaruh Audit Internal terhadap pencegahan Kecurangan; dan 4) menguji pengaruh pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan, terhadap pencegahan Kecurangan. Untuk menguji rumusan hipotesis tersebut di atas perlu dihitung masing-masing nilai koefisien korelasi koefisien jalur antara variabel peran Komite Audit ( $X_1$ ), Pengendalian Internal ( $X_2$ ), dan Audit Internal ( $X_3$ ) terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan ( $Y$ ) dan pencegahan Kecurangan ( $Z$ ).



**Gambar 1**  
**Hasil Pengujian Variabel  $X_1, X_2, X_3$ , dan  $Y$  Terhadap Variabel  $Z$**

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan uji statistika SPSS tampak pada Gambar 1, dari hasil perhitungan dan struktur jalur yang digambarkan, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Z = 0.6068*Y + 0.1173*X_1 + 0.1965*X_2 + 0.1382*X_3, Errorvar.= 0.1094, R^2 = 0.8906$$

|          |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| (0.2271) | (0.1413) | (0.1776) | (0.1519) | (0.05157) |
| 2.6714   | 0.8301   | 1.1064   | 0.9099   | 2.1213    |

Pada sub struktur kedua variabel Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berfungsi sebagai variabel independen, dan pencegahan Kecurangan sebagai variabel dependen. Selanjutnya untuk menguji pengaruh Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terhadap pencegahan Kecurangan terlebih dahulu dihitung koefisien jalur dari masing-masing variabel independen.

**Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara Simultan terhadap Pencegahan Kecurangan.**

Besarnya pengaruh peran Komite Audit ( $X_1$ ), Pengendalian Internal ( $X_2$ ), Audit Internal ( $X_3$ ), dan Tata Kelola Perusahaan ( $Y$ ) secara simultan terhadap Pencegahan Kecurangan ( $Z$ ) pada BUMN Tbk. di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Besarnya Pengaruh Komite Audit (X<sub>1</sub>), Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>),  
 Audit Internal (X<sub>3</sub>), dan Tata Kelola Perusahaan (Y)  
 terhadap Pencegahan Kecurangan (Z)**

| No | Pengaruh   | Besarnya Pengaruh |
|----|--|-------------------|
| a. | Pengaruh langsung:   |                   |
|    | X <sub>1</sub> terhadap Z  | 1,38 %            |
|    | X <sub>2</sub> terhadap Z  | 3,86 %            |
|    | X <sub>3</sub> terhadap Z  | 1,91 %            |
|    | Y terhadap Z   | 36,82 %           |
|    | Total pengaruh langsung  | 43,97 %           |
| b. | Pengaruh tidak langsung  |                   |
|    | Melalui X <sub>1</sub>   | 6,29 %            |
|    | Melalui X <sub>2</sub>   | 11,77 %           |
|    | Melalui X <sub>3</sub>   | 7,64 %            |
|    | Melalui Y  | 19,40 %           |
|    | Total pengaruh tidak langsung  | 45,09 %           |
| c. | Total pengaruh X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub> dan Y terhadap Z | 89,06 %           |

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian.

Dari hasil pengolahan dapat dilihat bahwa koefisien jalur dari keempat variabel independen tidak ada yang sama dengan nol. Karena koefisien jalur dari keempat variabel independen lebih besar dari nol, maka disimpulkan bahwa variabel Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan Kecurangan pada BUMN Tbk. di Indonesia.

Dari penjumlahan besarnya pengaruh keempat variabel independen secara parsial akan diperoleh pengaruh secara simultan keempat variabel independen. Jadi total pengaruh Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara simultan terhadap pencegahan Kecurangan pada BUMN Tbk. di Indonesia = 7,66% + 15,63% + 9,55% + 56,22% = 89,06%, artinya 89,06% baik buruknya pencegahan Kecurangan pada BUMN Tbk. di Indonesia disebabkan oleh peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Sementara nilai epsilon sebesar 10,94% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar keempat variabel tersebut.

Besarnya epsilon sebesar 10,94% mengisyaratkan bahwa masih ada pengaruh faktor-faktor lain di luar faktor yang diteliti yaitu:

- a. *Fraud auditor*. Sulistiyawati (2003) menyatakan jika *Fraud auditor* dapat bekerja dengan baik maka tindakan Kecurangan dapat dikurangi bahkan diberantas, sehingga akan terwujud Tata Kelola Perusahaan.
- b. *Director independent*. Lawrence *at al.*, (2000) menemukan hasil bahwa Komite Audit dengan komposisi dari *director independent* dan dengan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pertemuan setahun dapat mengurangi Kecurangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat: Lawrence *etc.* (2000), dan Indra Safitri (2002) mengatakan bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh komisaris *independent*, tidak terpisahkan dari berjalannya mekanisme Pengendalian Internal ditubuh emiten termasuk adanya Komite Audit, Abbott (2000) mengatakan bahwa Komite Audit yang ahli berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan, dan Cattrysse (2002) menyatakan bahwa Auditor Internal yang baik dapat mencegah Kecurangan. Dari besarnya pengaruh variabel independen tersebut terhadap pencegahan kecurangan, ternyata pengaruh yang paling besar adalah pengaruh pelaksanaan tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan tata kelola perusahaan pada BUMN Tbk. di Indonesia maka akan dapat mencegah terjadinya kecurangan lebih dini.

## **SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN**

### **Simpulan**

Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan, artinya peran yang optimal dari Komite Audit, penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dapat mencegah terjadinya Kecurangan dalam perusahaan. Secara parsial, variabel Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan mempunyai pengaruh terbesar terhadap pencegahan Kecurangan. Besarnya pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara simultan, mengindikasikan bahwa Kecurangan pada BUMN Tbk. di Indonesia dapat dicegah jika Komite Audit, penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dapat berperan sesuai yang disyaratkan baik melalui piagam Komite Audit, piagam Audit Internal, PSA 62 tentang Pengendalian Internal, KepMen BUMN maupun Bapepam LK dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan pada BUMN Tbk. di Indonesia.

### **Saran**

- a) Bagi dunia akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga dalam mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Tata Kelola Perusahaan dan Kecurangan.
- b) Penelitian ini belum mengungkapkan seluruh variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan Fraud, ternyata perlu diikutsertakan peran dari organ atau pilar Tata

Kelola Perusahaan lainnya, *Fraud auditor* dan *Director independent*. Maka dalam rangka pengembangan ilmu, bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan permasalahan serupa sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan setelah penelitian ini dengan menambah variabel independen dan unit analisisnya diperluas tidak hanya BUMN Tbk. saja.

- c) Untuk perusahaan atau organisasi, perlu diupayakan untuk mendeteksi kecurangan melalui pencegahan, mencegah adalah akar penyebab persoalan kecurangan. Jika belum atau tidak dapat mencegah, perusahaan atau organisasi hendaknya dapat segera mendeteksi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Untuk pengambil kebijakan seperti BEJ dan Bapepam LK, sesuai dengan ketentuan kewajiban bagi perusahaan publik tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan, agar selalu mengawasi perusahaan/emiten dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, terutama tentang *code of corporate governance*, yang menyajikan pedoman kepada BUMN Tbk. di Indonesia tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan. Serta menjadi masukan seberapa jauh peraturan Bapepam LK dan BEJ telah ditaati oleh emiten sebagai dasar untuk menerapkan sanksi bagi emiten yang belum atau tidak menerapkan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan harapan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan baik akan dapat mencegah praktik kecurangan yang merugikan banyak pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L.J.Y. Park, S. Parker. 2000. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. *Managerial Finance*. 26(11): 55-68.
- Abbot, J.I, Parkar, S & Peters. 2002. Dalam Joshi, P.L & Amal Wakil. 2004. A Study of the Audit Committee's Functioning in Bahrain – Empirical findings “. *Managerial Auditing Journal*. 19(7): 832-858.
- Agrawal Anup & Knober Charles R., 1996. Firm Performance and Mechanism to Control Agency Problem Between Managers and Shareholders. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. 34(3): 377-397.
- Beasley, Mark S. 1995. "An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud," *The Accounting Review*, October 1996, Volume 71, Number 4, pp. 443-465. Paper is the recipient of the American Accounting Association's (AAA's) Competitive Manuscript Award.

- Bradbury, M.E., Mak, Y.T. and Tan, S.M., 2004. Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals. *Working Paper*, Unitec New Zealand and National University of Singapore.
- Cadbury, Sir A. 1992. Dalam Colbert, Jenet L. 2002. Corporate governance: communications from internal and external auditors. *Managerial Auditing Journal* 17(3): 147-152
- Cattrysse, 2002. Reflections on Corporate Governance and the Role of the Internal Auditor. *Final Paper Master in Internal Auditing*. Jan. 2002.
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard, and Lucie Courteau, 2001. *Corporate Governance and Earnings Management*. Working paper, April 2001.
- Defond, M.L and Jiambalvo, J., 1994. Debt Convenan Violationt and Manipulation of Accruals. *Journal of Accounting & Economics*. 17: 145-176.
- Dezoort, FT, 2001. An Analysis of Experiance Effects on Audit Committee Members Oversight Judgments “ *Accounting Organizations and Society*. 2(1): 1-21.
- Dockery, E, Herbert, W E & Taylor, K, 2000. Corporate Governance, Managerial Strategies and Shareholder Wealth Maximizations: A Study of Large European Countries. *Managerial Finance Journal*. 2: 21-35.
- Firma Sulistiyowati, 2003. Peran Fraud Auditor Dalam Mendektesi Fraud untuk Mewujudkan Good Governance dan Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Februari 4: 13-24.
- Halla, Ilona P. 1999. A View of Corporate Governance and Control In Finland. *Managerial Auditing Journal*. 14(3):146-149.
- Indra Safitri. 2002 .*Indonesia Market Links Network*, (2 September 2002).
- Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIA). 1993. *Improving Audit Committee Performance: What Works Best*. Altamonte Springs, FL: Institute of Internal Auditors Research Foundation. *Internal Control – Integrated Framework*. New York: COSO.
- Jayanthi, Krishnan. 2005. *Internal Auditor Cuality and Internal Control: An Empirical Analysis*. *Social science Research Network*. <http://www.ssrn.com>.

- Jones, P. C. dan Bates, J. G. 1990. *Public Sector Auditing-Practical Techniques for an Integrated Approach. for an Integrated Approach*. Edisi 1. TJ Press Ltd., Padstow, Cornwall.
- Kirk, D.J .1994. Where is public accounting headed (Pead Marwich House Organ) 18 (4) 29; 31.
- Klein, 2000, Causes and Consequences of Variation in Audit Committee Composition, Working paper April, 2000, *Social Science Research Network*.
- Lawrence, Young, and Susan, 2000. The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. *University of Mamphis*. 26.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1995. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta. LP3ES.
- Mc.Mullen, D.A. 1996. Audit committee performance: An investigation of the consequences associated with audit committees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. 15 (Spring): 87-103.
- Menteri P-BUMN. 2002. *Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara* .SK.KEP No. 117/M/MBU/2002. tanggal 31 Juli 2002.
- Pincus, K.V. 1989. The efficacy of a red flags questionnaire for assessing the possibility of fraud. *Accounting, Organizations, and Society Journal*. 14: 153-163.
- Raghunandan, K., William J. Read dan Dasaratha V. Rama. 2001. Audit Committee Composition, "Gray Directors", and Interaction with Internal Auditing. *Accounting Horizons Journal*. 15(2): 105-118.
- Rindove V.P. 1999. What Corporate Boards Have to do with Strategy: a Cognitive Perspective. *Journal of Management Studies*. 36(7). 953-957 dalam Lukviarman. Niki. 2001 Key Characteristics of Corporation Governance: The Case of Indonesia. Graduate School of Business. Curtin University of Tehcnology, Perth. Western Australia.
- The Institute of Internal Auditors. 1993. *Standar for the Professional of Internal Auditing*.
- Zaman, Mahbub. 2001. Trunbull-Generating Undue Expectations of the Corporate Governance Role of Audit Committee. *Managerial Auditing Journal*. 16(1): 5-9.